

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*. Malang
UMM Press.
- Anwar, Khairil. (2011). Tesis Megister Ilmu Hukum: “*Pemberian KITAS bagi orang
asing disponsori istri ditinjau dari persepektif hukum keimigrasian*”.
Malang: Unbraw Malang
- Bambang, Sunggono. (2009). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- Betts Alexander dan Loescher Gil. (2011). *Refugees in International Relation*. New
York : Oxford University Press
- Black Law Dictionary
- Edwards, Alice. 2005. *Human Rights, Refugeess, and The Right To Enjoy Asylum*.
Oxford University;
- Elizabeth, A. Martin. (2002). *A Dictionary Of Law*. New York : Oxford Univercity
Press
- ELSAM. (2014). *Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum
Internasional*. Jakarta : ELSAM
- Firmansyah, M. (2013). *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang
No. 12 Tahun 2006*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara.
- Hamidi, Jazim dan Chrstian, Charles. (2021). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang
Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ibnu, Ismoyo. (2010). *Tinjauan Pengawasan Orang Asing dan Permasalahanya*.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ibrahim, Johni. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III.
Malang : Bayumedia Publishing
- Ishaq, Ropingi el. (2017). *Public Relations Teori & Praktik*. Malang : Intrans
Publishing
- Istanto, F Soengeng. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta : UAJ Yogyakarta

Jawahir Thontowi. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia*. Madya Press, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

L, Bernard. (2011). *Tanya, Politik Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

S, Guys dan Goodwin-Gill. (1988). *The Refugee in International Law (Second Edition)*. Oxford : Oxford University Press

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Wagiman.(2012).*Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika

Widodo, Josef Henokh. (2021). *Problematika Pengungsi Afghanistan di Indonesia*. Lembaga Bantuan Hukum. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

A.M. Mamohtob, Globalisasi dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan dan Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9, 2019.

Allain, Jean. “*The Jus Cogens Nature of Non refoulment*”, *International Journal of Refugee Law*. Vol. 13 No. 4 Tahun 2002 Oxford University Press;

Cifebrima, S., Rika, I., dan Rendi, P. *The Challenges of Indonesia as A “Quintessential Transit Country” For Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3 No. 2, 2020.

CNN Indonesia. (2022). *Pengungsi Afghanistan terlunta-lunta di RI, Berharap bantuan warga*.

Dewansyah, B. (2015). *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya*. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.88>.

- Fitria, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2015.
- Fitriani. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (*Refugee*) dalam Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. D 101 09 550.
- Handayani, Irawati. “Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (*Internally Displaced Persons*) dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional”. *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2 Tahun 2002. Bandung: UNPAD;
- Hasan, Muhardi dan Sari, Estika. 2005. Hak Sipil dan Politik. *Demokrasi*, Vol. IV No. 1.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Lentera Hukum*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i1.8428>.
- Rachaman, M. Kerjasama Indonesia dengan Lembaga-Lembaga terkait dalam Penanganan Pengungsi, *Jurist-Diction*, Vol.1 No. 1, 2018.
- Sanusi, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10 (No.2), pp.387-411.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga NegaraAsing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*). *Jurnal Pandecta*, Vol.10, (No.1), pp.14-29.
- Suwardi, Sri Setianingsih. “Aspek Hukum Masa- lah Pengungsi Internasional”, *Jurnal Hu- kum Internasional*, Vol.2 No.1 Tahun 2004, Jakarta: LPHI FH UI;
- Temmanengga.(2020). Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia.
- Yuliana, P., Arief, R., K., Penanganan Pengungsi dari Luar Negri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2018.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Akbar, Taufik dan Dwijayanti, Riski. 2022. Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>. Diakses pada 31 Juli 2023

CNN Indonesia. 2022. Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI, Berharap Bantuan Warga, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106-749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap-bantuan-warga>. Diakses pada 31 Juli 2023

Faricha, Anissa. 2013. Hak Sipil sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu, <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>. Diakses pada 31 Juli 2023

KONVENSI INTERNASIONAL

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Vol. 16. Indonesia, 2011.

Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951

Protokol 1961. tentang pengungsi Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Statua UNHCR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang HAM